



KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI

http://kliping.dpr.go.id

Judul	: Kepesertaan BPJS Kesehatan segmen PBI dinonaktifkan, pasien terancam terkendala saat berobat
Tanggal	: Selasa, 10 Februari 2026
Surat Kabar	: Rakyat Merdeka
Halaman	: 2

Kepesertaan BPJS Kesehatan Segmen PBI Dinonaktifkan Pasien Terancam Terkendala Saat Berobat

Belakangan ini ramai diperbincangkan penonaktifkan kepesertaan asuransi BPJS Kesehatan segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK). Kejadian ini membuat beberapa penerima PBI terkendala saat berobat di rumah sakit.

Diketahui, PBI sendiri adalah sebuah program bantuan sosial (bansos) dari Pemerintah kepada masyarakat yang tidak mampu berupa Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), agar mereka tidak perlu mengeluarkan biaya berobat.

Namun, tidak semua masyarakat berpeluang mendapatkan BPJS Kesehatan

PBI ini. Hanya mereka dari kalangan miskin atau rentan miskin yang berhak menjadi prioritas program tersebut.

Pemerintah lalu mengeluarkan kebijakan pemutakhiran data melalui SK Menteri Sosial No. 3/HUK/2026 yang berlaku mulai Februari 2026. Langkah ini diambil guna memastikan anggaran negara digunakan secara efektif untuk mereka yang benar-benar membutuhkan, terutama yang terdaftar dalam Data Tunggal Kesejahteraan Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) pada desil 1-5.

Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizky Anugerah menegaskan, rumah

sakit tidak boleh menolak pasien yang membutuhkan penanganan darurat. Ketentuan itu juga berlaku untuk peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan status PBI yang sedang tidak aktif.

"Jadi memang apapun itu (segmen peserta JKN) tidak boleh menolak untuk pengobatan, apalagi emergency, ini tidak boleh ditolak karena itu memang sudah sesuai dengan aturan perundang-undangan," jelas Rizky, di Jakarta.

Anggota Komisi IX DPR Fraksi Nasdem, Irma Suryani Chaniago, memberi-

kan penjelasan bahwa langkah pemutakhiran ini sangat krusial karena dinamika ekonomi masyarakat yang terus berubah. Menurut dia, pemutakhiran data tujuannya baik, agar pemegang kartu PBI benar-benar dapat sasaran.

"Mengingat banyak peserta yang dulu mungkin menganggur, sekarang sudah mapan atau punya usaha, sehingga status kepesertaananya perlu diessuaikan agar kuotanya bisa digunakan warga lain yang lebih membutuhkan," ujar Irma kepada Rakyat Merdeka, Minggu (8/2/2026).

Di sisi lain, Ketua Yayasan Lembaga

Konsumen Indonesia (YLKI) Niti Emiliana menyoroti pentingnya perlindungan bagi pasien rutin selama masa transisi data ini. Dia khawatir masyarakat mengalami kendala saat mendatangi fasilitas kesehatan untuk berobat.

"Penonaktifkan tanpa pemberitahuan memadai berisiko mengganggu pengobatan berkelanjutan bagi masyarakat rentan," tegas Niti, Minggu Sabtu (7/2/2026).

"Untuk mengetahui penjelasan mendalam dari Irma Suryani Chaniago dan Niti Emiliana terkait penataan data BPJS PBI ini, berikut wawancaranya.

IRMA SURYANI CHANIAGO, Anggota Komisi IX DPR

Tujuan Pemutakhiran Agar Tepat Sasaran

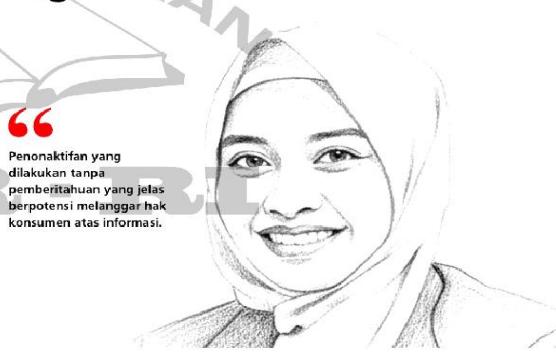


“

Intinya, anggaran kesehatan primer tidak boleh difisienki karena menyangkut hak konstitusi warga.

NITI EMILIANA, Ketua YLKI

Pasien Butuh Kepastian Agar Berobat Tak Putus



“

Penonaktifkan yang dilakukan tanpa pemberitahuan yang jelas berpotensi melanggar hak konsumen atas informasi.

Bagaimana Anda melihat penonaktifkan sejauhnya kepesertaan BPJS PBI saat ini?

Sekembar perlakuan data tunggal sosial ekonomi nasional (DTSEN) sosial rentan ini dilakukan terhadapnya sangat baik. Pemerintah juga memastikan bahwa manfaat JKN ini benar-benar diterima oleh warga yang tepat sasaran sesuai kriteria kemiskinan terlarut.

Artinya, ada banyak perubahan data ekonomi di lapangan yang harus diselesaikan?

Topi sekali. Banyak peserta yang dulu masuk kategori miskin karena pengangguran, namun sekarang alhamdulillah sudah mendapat pekerjaan atau memiliki usaha yang mapan. Secara umum, mereka

seharusnya beralih ke kepesertaan mandiri agar kuota PBI-nya bisa dialihkan kepada warga lain yang saat ini masih kesulitan namun belum ter-cover.

Bagaimana dengan keluhan warga miskin yang hasil dinonaktifkan ini secara mendadak?

Nah, di sinilah letak pertanyaan silsilahasi data. Memang ditemukan bahwa di mana warga yang belum mendapat sanksi ini tetap berstatus miskin atau mengalami penyakit berat ikut dinonaktifkan. Ini yang, kami minta untuk segera diperbaiki kembali untuk keselamatan jiwa mereka tetapi terjaga selama proses verifikasi ulang.

Apakah pemutakhiran data ini akibat sinkronisasi data ini?

Data kemiskinan itu dinomik. Ada yang baru saja kena PHK. Jadi tidak mungkin untuk segera diperbaiki kembali untuk keselamatan jiwa mereka tetapi terjaga selama proses verifikasi ulang.

Apakah solusi yang Anda tawarkan untuk meminimalisir kegaduhan

atas sinkronisasi data ini?

Saya menitipkan Pemerintah, mulai dari tingkat kota desa, Pemda, Kecamatan, hingga BPJS Kesehatan duduks bersama. Koordinasi ini penting untuk bisa menyelesaikan kasus pemutakhiran secara cepat dan akurat di lapangan, sehingga tidak menimbulkan spekulasi di publik.

Apakah pemutakhiran data ini harus dilakukan segera seiring munculnya?

Data kemiskinan itu dinomik. Ada yang baru saja kena PHK. Jadi tidak mungkin untuk segera diperbaiki kembali untuk keselamatan jiwa mereka tetapi terjaga selama proses verifikasi ulang.

Apakah solusi yang Anda tawarkan untuk meminimalisir kegaduhan

YLKI menyoroti aspek perlindungan komunitas dalam kebijakan ini, apa point utamanya?

Kami mengenyamkan kebijaksanaan sosialisasi kepada masyarakat yang dimonifikasi. Pemutakhiran yang dilakukan tanpa pemberitahuan yang jelas berpotensi melanggar hak konsumen atas informasi. Pasien butuh kepastian agar pengobatan mereka tetap terputus di tengah jalan.

Apakah dampak yang paling dirasakan pasien penderita penyakit kronis?

Bagi penderita penyakit jantung ataupun cuci darah, keterlambatan informasi soal status kesehatan bisa berakibat fatal. Kami melihat adanya risiko terputusnya akses layanan medis rutin bagi masyarakat rentan yang sangat bergantung pada jaminan PBI-nya.

Apakah rekomendasi YLKI untuk masa transisi pemutakhiran data pemerintah ini?

Pemerintah perlu memberi tahu masyarakat bagi pasien yang sedang menjalani pengobatan berkelanjutan. Jangan semata karena kurang verifikasi data, tindakan medis atau pemberian obat di rumah sakit tetapi. Keselamatan pasien harus tetap menjadi prioritas utama.

Apakah akan ada posko pengadaan bagi masyarakat?

Buat, kami membuka ruang pengadaan melalui email konsurvo@ylki.or.id. Data pengadaan ini akan kami jadikan bahan evaluasi dan advokasi kepada pemerintah agar kelajuan pemutakhiran data tetap mengedepankan prinsip perlindungan konsumen.

Langkah apa lagi yang akan dilakukan YLKI untuk mewujudkan ini?

Kami akan berusaha cari kepada Kemensos dan BPJS Kesehatan untuk meminta rincian klarifikasi yang mudah diakses. Proses reaktivasi bagi warga yang memang masih memenuhi syarat harus dilakukan segera dan tidak berbelit-belit.

Apakah harapan Anda terhadap integrasi data kesehatan nasional ke depannya?

Negrive wajib memastikan setiap warga tetap mendapatkan perlindungan dan akses kesehatan sesuai konstitusi. Kebijakan administratif atau perwesanan anggaran tidak boleh mengabaikan keberlanjutan layanan kesehatan bagi kelompok miskin dan rentan. ■ NM